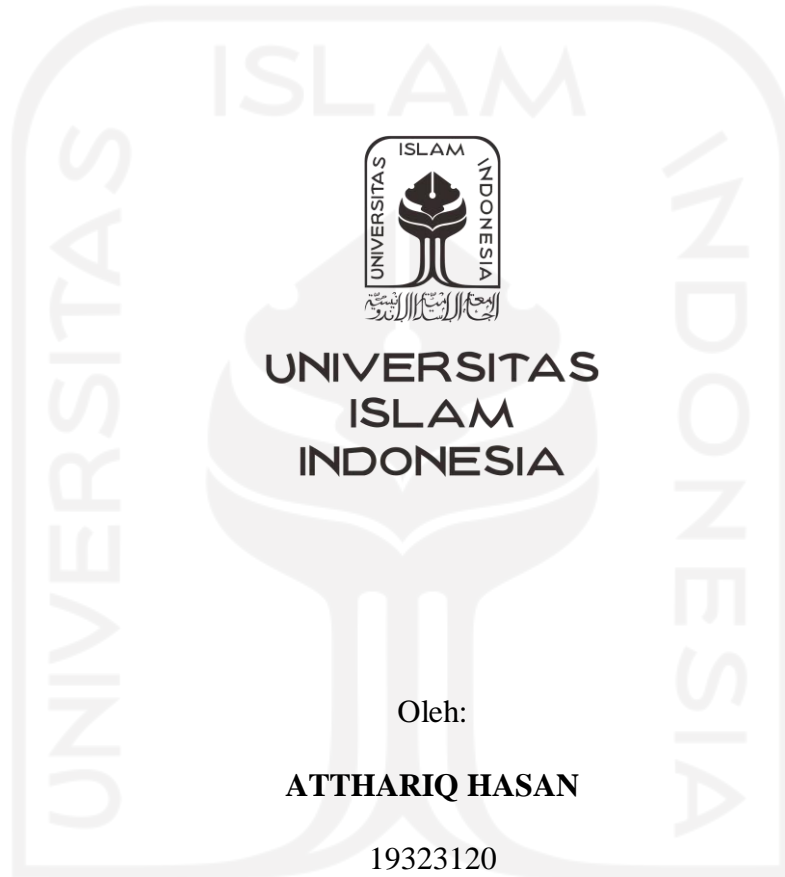


**FUNGSI UN WOMEN DALAM MENGATASI *WOMEN***

***TRAFFICKING* DI THAILAND TAHUN 2020-2022**

**SKRIPSI**



Oleh:

**ATTHARIQ HASAN**

19323120



**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2023**

**FUNGSI UN WOMEN DALAM MENGATASI *WOMEN***

***TRAFFICKING* DI THAILAND TAHUN 2020-2022**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

**ATTHARIQ HASAN**

19323120

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**FUNGSI UN WOMEN DALAM MENGATASI *WOMEN TRAFFICKING*  
DI THAILAND TAHUN 2020-2022**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh  
derajat Sarjana SI Hubungan Internasional



Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

*Karina*  
Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Gustrieni Putri, S.IP., M.A.
- 2 Karina Utami Dewi, S.IP., M.A.
- 3 Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.

Tanda Tangan

## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa proposal skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

*29 Juli 2022,*

A 10,000 Indonesian Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SPULUH RIBU RUPIAH', '10000', 'POSTAGE', 'TEMPER', and the serial number 'DE8A8AJX84096150'.

---

*ATTHARIQ HASAN*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	iii
<b>PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK</b>	iv
<b>DAFTAR ISI</b>	v
<b>DAFTAR TABEL</b>	vi
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	vii
<b>DAFTAR SINGKATAN</b>	viii
<b>ABSTRAK</b>	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
<b>1.1 Latar Belakang</b>	1
<b>1.2 Rumusan Masalah</b>	6
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b>	6
<b>1.4 Cakupan penelitian</b>	6
<b>1.5 Tinjauan Pustaka</b>	7
<b>1.6 Kerangka Pemikiran</b>	10
<b>1.7 Argumen Sementara</b>	13
<b>1.8 Metode Penelitian</b>	14
1.8.1 Jenis Penelitian	14
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian	15
1.8.3 Metode Pengumpulan Data	15
1.8.4 Proses Penelitian	15
<b>1.9 Sistematika Pembahasan</b>	16
<b>BAB II Perdagangan Perempuan Masa <i>Covid-19</i> di Thailand</b>	17
<b>2.1 Perdagangan Perempuan Sebelum Masa <i>Covid-19</i> di Thailand</b>	17
<b>2.2 Perdagangan Perempuan masa <i>Covid-19</i> di Thailand</b>	22
<b>BAB III Fungsi UN Women Dalam Mengatasi Perdagangan Perempuan Di Thailand</b>	27
<b>3.1 Fungsi UN Women sebagai organisasi internasional yang sentral</b>	28
<b>3.2 Fungsi UN Women sebagai organisasi internasional yang independen</b>	34
<b>BAB IV PENUTUP</b>	43
<b>4.1 Kesimpulan</b>	43
<b>4.2 Rekomendasi</b>	45
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	47

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Kekerasan dan Kejahatan Seksual 2020.....	1
Tabel 1.1. Types of Human Trafficking in Thailand 2020-2022.....	3



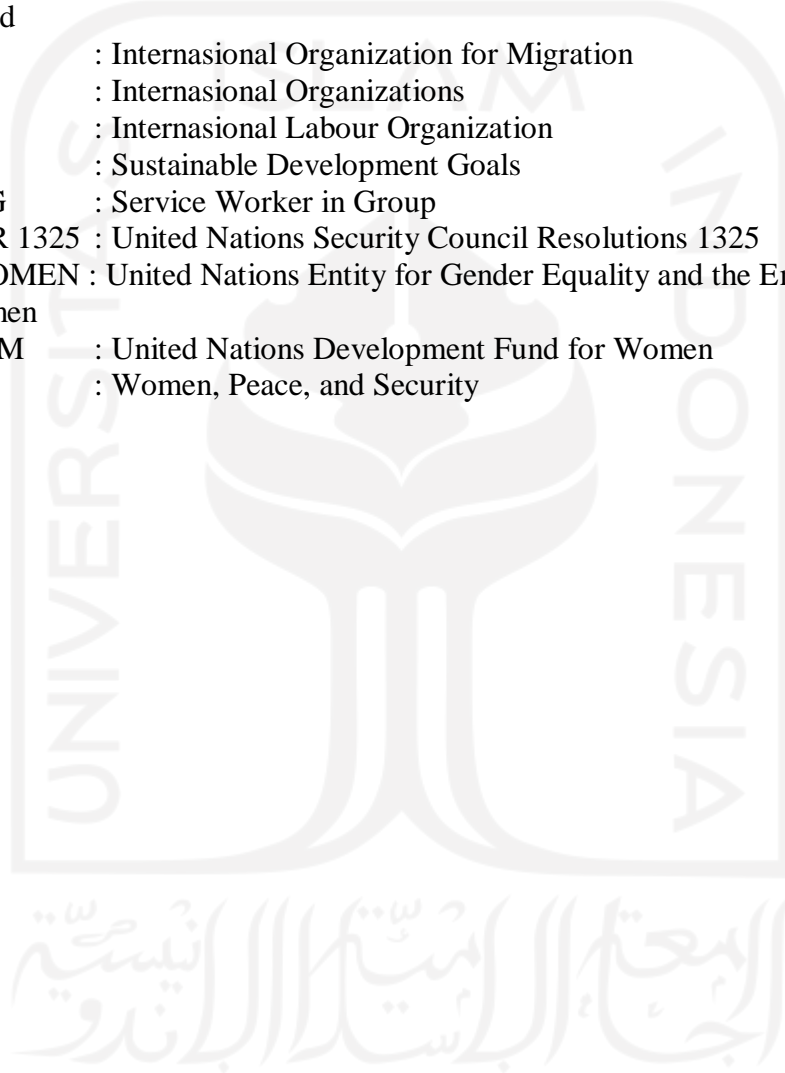
## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2. Jumlah Korban Perdagangan di Thailand 2020-2022.....	22
Gambar 2.2.1 Kasus Perdagangan Perempuan Bentuk Prostitusi 2020-2022.....	22



## DAFTAR SINGKATAN

CEDAW	: The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women
Covid-19	: Corona Virus Disease 2019
CSW	: The Commission on the Status of Women
ECOSOC	: Economic and Social Council
FLEP Thailand	: Foundation for the Promotion of Labor and Employment, Thailand
IOM	: Internasional Organization for Migration
IOs	: Internasional Organizations
ILO	: Internasional Labour Organization
SDGs	: Sustainable Development Goals
SWING	: Service Worker in Group
UNSCR 1325	: United Nations Security Council Resolutions 1325
UN WOMEN	: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
UNIFEM	: United Nations Development Fund for Women
WPS	: Women, Peace, and Security





## ABSTRAK

Perdagangan perempuan di Thailand telah terjadi sejak dahulu zaman kerajaan Ayutthaya hingga pada tahun 2020-2022 mengalami peningkatan akibat kegiatan prostitusi yang masih berjalan melalui media internet atau secara daring. UN Women sebagai organisasi internasional yang berfungsi penting dalam mewujudkan kesetaraan gender dan menyadarkan masyarakat perihal perempuan setara dengan lelaki serta bergerak untuk mengatasi perdagangan perempuan di Thailand. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis fungsi UN Women dalam mengatasi perdagangan perempuan di Thailand Tahun 2020-2022 dengan menggunakan teori fungsi organisasi internasional yang dikemukakan oleh Abbott dan Snidal (1998) yang terdiri dari tiga fungsi, yakni sentral, independen, dan perwakilan dan penegakan hukum. UN Women di Thailand menggunakan fungsinya hanya sentral dan independen. Penyebab perdagangan perempuan setiap tahunnya dipengaruhi oleh struktur sosial, oknum polisi dan pejabat menggunakan sebagai bisnis, penyumbang pendapatan nasional, terdapat organisasi pendukung pekerja seks.

**Kata Kunci:** Perdagangan Perempuan, Thailand, UN Women, Fungsi Organisasi Internasional, Kesetaraan Gender, Covid-19, Daring, Penyebab.

## ABSTRACT

The trafficking of women in Thailand has occurred since the days of the Ayutthaya kingdom until in 2020-2022 there was an increase due to prostitution activities that were still running through the internet or online. UN Women as an international organization that plays an important role in realizing gender equality and making society aware of women being equal to men and moving to address women's trafficking in Thailand. This study aims to analyze the role of UN Women in overcoming women's trafficking in Thailand 2020-2022 using the function theory of international organizations proposed by Abbott and Snidal (1998) which consists of three roles, namely central, independent, and representative and law enforcement. UN Women in Thailand uses its role only central and independent. The causes of trafficking in women are annually influenced by social structures, police and officials using as businesses, contributing to national income, and supporting organizations for sex workers.

**Keywords:** Women Trafficking, Thailand, UN Women, The Role of International Organizations, Gender Equality, Covid-19, Online, Causes.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu kejahatan yang masih banyak diperbincangkan adalah perdagangan manusia. Perdagangan manusia sering kali aktivitasnya tidak diketahui oleh pihak perbatasan sebuah negara, biasanya korban perdagangan manusia diselundupkan melalui jalur laut. Pelaku biasanya melakukan penganiayaan, eksploitasi, dan mengambil hak orang lain secara paksa dengan kekerasan berupa fisik, psikis, hingga nyawa (Oryza 2016). Penyebab terjadinya perdagangan manusia disebabkan oleh 4 faktor, yakni (1) Meninggalkan tempat dari kemiskinan untuk mengubah nasib, (2) dapat dipengaruhi oleh kondisi politik suatu negara, (3) karena perang, dan (4) praktik sosial budaya masyarakat wujud patriarki (Center for Global Impact 2015).

Thailand merupakan negara kawasan Asia Tenggara yang masih tergolong tinggi kasus perdagangan manusianya. Faktor yang mendorong perdagangan manusia di Thailand disebabkan karena perbedaan ekonomi regional dan membuka peluang pelaku perdagangan manusia.

**Tabel 1. Data Kekerasan dan Kejahatan Seksual 2020**

Kekerasan & Kejahatan Seksual 2020	Myanmar	Singapura	Thailand
Eksplorasi Seksual	-	-	28338
Kekerasan Seksual	18	1668	2704
Tindakan kekerasan seksual lainnya	44	-	-

Sumber : dataunodc.un.org

Data diatas menunjukkan jumlah kekerasan dan kejahatan seksual di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2020 bahwa tindak kekerasan yang kerap terjadi, ialah kekerasan seksual di negara Thailand ketimbang negara Myanmar dan

Singapura. Bahkan, masalah terbanyak pada eksploitasi seksual di Thailand (UNODC 2022).

Keadaan ekonomi masyarakat Thailand yang minim disebabkan oleh tingginya kemiskinan dan pengangguran. Keadaan ekonomi yang kurang membuat orang tua tidak dapat menyekolahkan anaknya dan terpaksa bekerja di tempat prostitusi sebagai pekerja seks untuk menopang kondisi ekonomi keluarga yang mayoritas perempuan dan anak perempuan. Adanya keinginan untuk mengubah nasib kehidupan dan sebagian besar dari mereka mendapatkan nasib yang kurang beruntung (Oryza 2016).

Wisata seks di Thailand juga telah menyumbang 60 persen pendapatan nasional negara dalam sektor pariwisata dan prostitusi dapat menghasilkan banyak uang dalam waktu singkat. Hal inilah yang membuat perempuan terpaksa dengan pekerjaan ilegal untuk memenuhi kebutuhan pokok, tuntutan gaya hidup, lapangan pekerjaan tidak tersedia untuk perempuan muda dari desa yang kurang berpendidikan dan berketerampilan dengan kehidupan yang serba terbatas (pssat 2017).

Pandemi Covid-19 membatasi turis dan masyarakat Thailand keluar masuk negara untuk mengurangi penyebaran virus yang menyebabkan masyarakat Thailand termasuk pekerja seks terpaksa harus melakukan aktivitasnya di rumah masing-masing melalui daring. Kenaikan kasus ini, disebabkan karena masyarakat Thailand tidak mendapatkan penghasilan yang cukup seperti sebelum pandemi, bahkan pekerja seks ketika pandemi terhenti sebab pembatasan keluar masuk turis yang datang ke Thailand (Royal Thai Government 2022).

**Tabel 1.1 Types of Human Trafficking in Thailand**

Types of Human Trafficking		Tahun		
		2020	2021	2022
Sexual Exploitation	Prostitution	96	136	162
	Pornography	17	13	33
	Sexual Exploitation	6	7	9
Forced Labour	Enslavement	0	1	1
	Forced Begging	2	2	3
	General Forced Labour	10	16	38
	Forced Labour fisher	2	2	1
	Extortion or other	0	11	1
Total		133	188	248

Sumber: Royal Thai Gov 2022

Diketahui bahwa kasus perdagangan manusia kembali mengalami peningkatan drastis, yang awalnya pada tahun 2020 sebanyak 133 kasus meningkat menjadi 248 kasus pada tahun 2022. Kasus perdagangan manusia mengalami peningkatan karena eksploitasi seksual berupa prostitusi (Royal Thai Government 2022). Diketahui pula bahwa perempuan merupakan korban terbanyak dalam perdagangan manusia yang tercatat hingga 2022 sebesar 340 korban di mana mayoritas disebabkan karena eksploitasi seksual. Sehingga, perdagangan perempuan menjadi fokus utama UN Women untuk mengatasi hal tersebut (Royal Thai Government 2022). Diperkirakan terdapat 200.000 hingga 300.000 jiwa diperdagangkan sebagai pekerja seks komersial di bawah umur (Sitinjak, Kurniawan, & Paramahita 2022).

Permasalahan perdagangan perempuan ini, merupakan kasus yang banyak dibahas dalam PBB, khususnya pada UN Women. UN Women didirikan PBB setelah terjadinya Perang Dunia II yang kemudian diawali dari ECOSOC yang membentuk CSW dengan tujuan mempersiapkan rekomendasi dan laporan PBB terkait dengan promosi kesetaraan gender dalam semua bidang, kemudian tahun 1975 dicanangkan sebagai *Internasional Women's Year*. Pada 1 April 1976

terciptanya Dana Sukarela Satu Dekade PBB atau Dana Pembangunan PBB untuk Perempuan, setelahnya terbentuklah UNIFEM tahun 1984 hingga 2010 dengan fokus pemberdayaan perempuan dan memperjuangkan hak asasi perempuan. Kemudian kembali diubah menjadi UN Women yang diberlakukan sejak 2011.

UN Women berdiri mempunyai maksud fungsi utama, yakni dalam memberikan sumbangsih untuk mencapai kesetaraan gender selayaknya laki-laki dapat bekerja untuk pemerintah, bekerja untuk membuat kebijakan, mendapatkan akses layanan publik serta berkontribusi dalam aksi perdamaian dunia. Fungsi ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menghargai dan mengakui status gender perempuan (Suri, Hamka, & Noerzaman 2020). Makanya, UN Women organisasi yang aktif dalam mengatasi perdagangan perempuan.

Sejak masa Kerajaan Ayutthaya (1351-1767), prostitusi di Thailand merupakan kegiatan yang legal dan dikenakan pajak. Pada tahun 1905, perempuan sebagai pekerja seks untuk bertahan hidup dan jutaan pekerja konstruksi Tiongkok yang datang untuk seks. Keterbatasan ekonomi telah menjadi budaya banyak perempuan Thailand bekerja sebagai pelayan seks sejak masa kerajaan hingga 1990-an (Stekom 2018).

Sejarah yang kelam di Thailand terhadap perempuan yang membuat UN Women masuk ke Thailand pada tahun 1994. Dalam menghadapi kasus perdagangan perempuan di Thailand, pemerintah telah memberlakukan beberapa dasar hukum yang diterapkan untuk melindungi dan mencegah masyarakat Thailand termasuk imigran dari perdagangan yang berbentuk eksploitasi seksual. Pemerintah Thailand mempunyai dasar hukum mengenai perdagangan perempuan, yakni Undang-Undang Pencegahan dan Penghapusan Pelacuran (*Prevention and Suppression of Prostitution Act, B.E. 2539 (1996)*), Amandemen Undang-Undang Hukum Pidana

No.14, B.E. 2540 (1997), dan Undang-Undang Tempat Hiburan 1996 (Stekom 2018)

Kerjasama UN Women yang pernah dilakukan dengan berbagai negara untuk mengadakan konvensi internasional (CEDAW) untuk membahas perdagangan perempuan di negara berkembang dan miskin. Hasil ratifikasi konvensi CEDAW ini, telah membantu pemerintah Thailand merevisi Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia tahun 2008 (Oryza 2016). Kenyataannya tetap mengalami peningkatan hingga sekarang.

Maka dari itu, inilah yang menjadi fokus UN Women di Thailand ketika *Covid-19* dengan memberikan alternatif atau membuka akses pekerjaan melalui kerjasama dari berbagai pihak, baik pemerintah dan organisasi internasional lainnya agar dapat mengurangi perdagangan perempuan mengenai eksploitasi seksual secara daring. Mereka membantu merevisi regulasi yang telah ada dalam konvensi CEDAW. Namun, ada pengaruh yang dominan menyebabkan prostitusi masih marak karena asumsi agama Buddha di Thailand terhadap perempuan, struktur sosial Thailand yang cenderung menerima bentuk kekerasan terhadap perempuan, adanya produk hukum yang mendukung keberadaan industri seks, mafia yang terlibat dalam partai politik, dan eksploitasi yang dilakukan oleh polisi dan pejabat (Stekom 2018).

Untuk itu, dalam skripsi ini peneliti akan menganalisis fungsi UN Women dalam mengatasi perdagangan perempuan di Thailand tahun 2020-2022. Sebab, di antara tahun 2020-2022 mengalami peningkatan kasus perdagangan perempuan disebabkan oleh Pandemi *Covid-19* yang membatasi aktivitas masyarakat Thailand yang dilakukan secara daring. Tentunya, kejadian ini merupakan kasus yang

meresahkan, apalagi masalah ini tetap meningkat. Tentunya dampak buruknya, dapat menghancurkan peradaban, apalagi perempuan tidak diperlakukan dengan layak.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimanakah fungsi UN Women dalam mengatasi *women trafficking* di Thailand pada tahun 2020-2022?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Menjelaskan bagaimanakah fungsi UN Women dalam mengatasi *women trafficking* di Thailand pada tahun 2020-2022.

## **1.4 Cakupan penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis mengangkat kasus perdagangan perempuan di Thailand. Thailand termasuk negara dengan kasus perdagangan manusia yang setiap tahunnya mengalami kenaikan kasus secara drastis. Perempuan merupakan korban yang paling dominan menjadi objek eksploitasi seksual, pekerjaan, maupun kekerasan lainnya. Penelitian ini akan lebih membahas mengenai fungsi UN Women dalam mengatasi perdagangan perempuan di Thailand dengan menggunakan analisis fungsi organisasi internasional. Alasan mengambil UN Women karena organisasi ini mempunyai tugas utama dalam memerangi kekerasan sehingga perempuan dapat setara dengan laki-laki dan memberikan solusi alternatif kerja sama dengan mitra organisasi UN Women. Penelitian ini mengambil pada tahun 2020-2022. Di mana pada rentang tahun 2020-2022 mengalami peningkatan perdagangan perempuan berkaitan dengan tingginya prostitusi akibat dari efek *Covid-19* melalui penggunaan internet atau daring di Thailand. Kemudian peneliti akan melihat seperti apa fungsi UN Women sebagai organisasi yang mengatasi

perdagangan perempuan dihubungkan dengan teori fungsi organisasi internasional Abbott dan Snidal (1998).

## **1.5 Tinjauan Pustaka**

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang telah dijadikan peneliti untuk ditinjau dalam penelitian skripsi ini, dari beberapa jurnal yang saya temukan.

Dalam penelitian yang ditulis oleh Oryza (2016) dengan judul “Peran UN Women dalam Upaya Thailand Mengatasi Permasalahan Perdagangan Perempuan”, ia membahas kejadian adanya perdagangan manusia terhadap perempuan yang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya ialah faktor ekonomi yang mendesak ekonomi masyarakat Thailand yang minim dipengaruhi oleh banyaknya pengangguran dan kemiskinan yang tinggi. Dampaknya kurangnya kualitas pendidikan akibat ekonomi yang minim sehingga mudah ditipu oleh desakan materi yang berhasil membujuk korban menjadi diperdagangkan. Dalam menghadapi kasus perdagangan Thailand telah memberlakukan kebijakan untuk melindungi kaum migran dari perdagangan manusia (Oryza 2016).

Di lain sisi, terdapat jurnal yang juga membahas pengaruh UN Women, pada jurnal yang ditulis oleh Suri, Hamka & Noerzaman (2020) berjudul “Peranan *United Nations Women* dalam Mengatasi Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Indonesia Tahun 2016-2017. UN Women bergerak di Indonesia mengambil tindakan mengenai kekerasan seksual di rumah tangga, sehingga perlu ditangani karena kekerasan ini merupakan kategori kekerasan berupa psikis dan fisik serta adanya kekerasan yang semakin marak membuktikan hukum Indonesia masih sangat lemah pada kasus-kasus kekerasan seksual ini. Sehingga terdapat beberapa peran UN Women di Indonesia, yakni memberikan pelatihan dengan



menyediakan layanan perempuan korban kekerasan dan reintegrasi sosial, memberikan paham hukum, pemberdayaan ekonomi, memfasilitasi layanan pendampingan, dan memfasilitasi sarana prasarana korban kekerasan serta perlindungan hak perempuan lintas sektor (Suri, Hamka & Noerzaman 2020).

Ditemukan jurnal yang ditulis oleh Resti (2017) dengan judul “Upaya UNIFEM dalam Menangani Masalah Diskriminasi dan Kekerasan Perempuan di Bangladesh”. Dalam jurnalnya ia membahas upaya UNIFEM menangani diskriminasi dan kekerasan perempuan dengan menunjukkan langkah, yakni promosi dan penyebarluasan informasi, kerjasama antara akademisi dan organisasi non-pemerintah, penggalangan dana, dan kerjasama dengan aktor-aktor internasional. Dengan melalui cara promosi dan penyebarluasan informasi, UNIFEM melakukan penyebarluasan informasi kepada masyarakat Bangladesh sebab tidak semua masyarakat memahami hak-hak perempuan melalui media (Resti 2017).

Kemudian pada jurnal yang ditulis oleh Annisa (2021) dengan judul “Upaya *UNITED Nations Women (UN Women)* dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender Melalui Kampanye *HEFORSHE* di Indonesia Tahun 2021 dalam penelitiannya, ia mengutip dari survei *Women’s Health and Life Experiences* yang menyebutkan bahwa perempuan di Indonesia usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan seksual yang juga mengaitkan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan dengan besaran upah 80% di bawah laki-laki. Selain itu, ketidaksetaraan gender menjadi faktor adanya kekerasan dan lemahnya perlindungan negara kepada perempuan. Akibatnya pelecehan dan kekerasan dalam rumah tangga tampaknya melebar, sehingga membuat masalah ini masuk pada ranah *UN Women Goodwill* untuk

mempermudah capaian yang dituju. Akhirnya terdapat kampanye yang dibangun *HeForShe* yang menjadi platform demi mewujudkan hal tersebut (Annisa 2021).

Adapun jurnal yang ditulis oleh Nurfahirah, Dewi, & Gustiana (2022) dengan judul “Upaya *United Nations Women* (UN Women) dalam Menangani Diskriminasi Terhadap Perempuan di Afghanistan berisikan perkembangan yang semakin dinamis membuat perempuan berdampak pada kekerasan terhadap perempuan baik fisik maupun psikis. Afghanistan terlihat menjadi negara penyumbang diskriminasi perempuan yang berakibatkan terbatasnya hak perempuan mendapat pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan layak. Kemudian dalam jurnal ini berkaitan dengan kelompok Taliban yang turut menjadi penyumbang kekerasan terhadap perempuan dengan anggapan sebagai beban keluarga yang tidak dapat menghasilkan upah seperti laki-laki. Melihat perkembangan sebelum Taliban berkuasa, perempuan diberikan kebebasan berekspresi dan berpendapat bahkan berkuliah, bekerja, dan berbisnis. Untuk itu, hal ini menjadi perhatian bagi UN Women yang dapat mewujudkan kesetaraan tersebut, tetapi di Afghanistan cenderung terbilang rumit disebabkan kebudayaan tradisional sangat kental yang memberikan batasan peran perempuan (Nurfahirah, Dewi & Gustiana 2022)

Berdasarkan hasil tinjauan kelima jurnal ini, peneliti melihat bahwa *UN Women* tidak dapat terjun secara langsung namun lebih cenderung melakukan kerja sama yang dibangun oleh pemerintah. Pemerintah dalam mengatasi masalah perdagangan manusia khususnya perempuan mengadakan ratifikasi peraturan dengan UN Women melalui CEDAW. Namun pemerintah belum terlihat mengambil tindakan, kemungkinan karena ada beberapa oknum dan organisasi yang menghambat terlaksananya UN Women membantu mengatasi perdagangan

perempuan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, disini peneliti ingin menganalisis kembali fungsinya UN Women sebagai organisasi internasional dengan menggunakan teori fungsi organisasi internasional dari Abbott dan Snidal. Kemudian dari teori tersebut peneliti akan mencoba menyandingkan dengan permasalahan *women trafficking* yang selalu bertambah setiap tahunnya di Thailand.

## **1.6 Kerangka Pemikiran**

Pada kerangka pemikiran dalam penelitian mengenai fungsi UN Women dalam mengatasi *women trafficking* di Thailand, kerangka yang digunakan berpacu pada teori fungsi organisasi internasional. Alasan penulis mengambil teori fungsi organisasi internasional karena berkaitan dengan UN Women yang akan diteliti fungsinya dalam mengatasi perdagangan perempuan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Abbott dan Snidal (1998) yang tertuang dalam Jurnal “Why States Act Through Formal International Organizations” bahwa terdapat 2 fungsi, yakni sebagai berikut:

### **1. Organisasi internasional sebagai organisasi yang sentral**

Organisasi internasional dengan membawa fungsi ini, dapat memperlihatkan aktivitas pendukungnya terhadap negara yang dipengaruhi kapabilitas, pemahaman, dan kepentingannya. Organisasi Internasional dipahami dengan sebuah struktur yang konkret dan stabil serta mengatur administratif yang mengelola aktivitas. Tampak lebih mekanis yang mampu merubah pandangan sebuah negara maupun interaksi tersebut. Manfaat IOs dapat secara interaksi langsung dengan negara dan kegiatan operasional. Dalam interaksi langsung dengan negara, organisasi yang mapan dapat membentuk stabilnya forum negosiasi,

meningkatkan literasi dan efek reputasi. Sentralisasi membentuk interaksi politik sebuah negara dan IOs menyediakan forum netral, depolitisasi, atau lebih khusus daripada pengaturan yang terdesentralisasi. Organisasi internasional lebih dari sekadar mendukung negosiasi antarpemerintah dengan mengatur berbagai aktivitas operasional. Umumnya organisasi operasional memiliki biaya beragam dan birokratis, struktur organisasi yang kompleks, dan struktur otonomi bersubstansi. IOs juga mempengaruhi kemampuan, pemahaman dan keterkaitan negara.

Aktivitas yang dilakukan oleh IOs seringkali berupa *Pooling*, *Joint Production*, dan *Norm Elaboration and Coordination*. *Pooling* hubungannya berkaitan dengan kemampuan dalam mengumpulkan aktivitas, aset, atau risiko. Hal yang dimaksud entitas terpisah dengan struktur organisasi yang stabil dan staf khusus dapat mengurangi biaya transaksi. *Joint Production* lebih mengarah kepada hubungan yang berkaitan dengan IOs yang dapat menguntungkan, terlibat dalam sebuah kerja tim yang diatur secara hirarkis pengawasan oleh negara-negara anggota. *Norm Elaboration and Coordination*, IOs yang mempunyai prosedur dalam menetapkan aturan, standar, dan spesifikasi meningkatkan kerja sama negara-negara anggota untuk mempertahankan kekuatan guna mempengaruhi norma-norma internasional dan perilaku negara serta memberi perlindungan bagi negara-negara yang lemah.

## 2. Organisasi internasional sebagai organisasi yang independen

Organisasi internasional dipahami sebagai otoritas yang bertindak independen sampai batas dan sering kali netral dalam bidang tertentu. Fungsi ini menyetarakan antara distribusi kolektif jangka pendek dan panjang negara kuat agar tidak dipengaruhi mereka dengan kemandirian organisasi yang dibahas bersama

untuk mengurangi keefektifan dan kemampuan organisasi. IOs dapat mengubah sebuah keputusan yang mempengaruhi kegiatan negosiasi. Dalam organisasi internasional aktivitas dapat berupa pencucian dan netralitas. pencucian seringkali berkaitan dengan hal yang mengandung konotasi negatif menjalankan kegiatan yang untuk mendapatkan keuntungan ilegal melalui lembaga keuangan yang independen dan sebuah otonomi memerlukan pencucian konotasi ini secara sukses memberikan pengaruh IOs kepada substansi kegiatan mereka. Disisi lain Netralitas juga menjadi alasan ketidakberpihakan pada independensi yang memungkinkan IOs menjadi penengah interaksi yang disengketakan meliputi perselisihan dan keputusan alokasi di antara negara bagian. IOs dikatakan sebagai organisasi independen sebab ada netralitas yang dipahami dapat penampung informasi netral, menjadi wali, sebagai pengalokasi, dan sebagai pemantau (Abbott, K.W., & Snidal, D., 1998).

### 3. IOs sebagai organisasi perwakilan masyarakat & penegakan hukum

Organisasi internasional ditetapkan oleh negara-negara bagian agar dapat bertindak sebagai perwakilan dari sebuah negara. Lembaga-lembaga ini yang mewakili dapat mengambil beberapa tindakan mungkin dapat membentuk badan inklusif yang menangani suatu masalah yang akhirnya dibentuklah forum yang dapat mengatasinya dan negara dalam lembaga tersebut bekerja dan mengekspresikan nilai kebersamaan. Dalam prosesnya, negara mempertimbangkan segala bentuk perhatian untuk menekan yang lainnya untuk menerima prinsip seperti hak asasi manusia. Organisasi internasional sebagai pemberi kepastian kepatuhan terhadap sebuah komitmen internasional yang dipahami dengan

penyelarasan pandangan proses manajerial dan penegakan (Abbott, K.W., & Snidal, D., 1998).

Dengan melihat dari ketiga fungsi organisasi internasional yang ditulis oleh Abbott dan Snidal (1998), peneliti melihat bahwa fungsi UN Women hanya sebagai organisasi internasional yang sentral dan independen. Sebagai organisasi sentral UN Women bertujuan mengatasi perdagangan perempuan di mana organisasi ini sering mengadakan kegiatan *Joint Production* lebih mengarah kepada hubungan yang berkaitan dengan IOs yang dapat menguntungkan, terlibat dalam sebuah kerja tim yang diatur secara hirarkis pengawasan oleh negara-negara anggota. *Norm Elaboration and Coordination*, IOs yang mempunyai prosedur dalam menetapkan aturan, standar, dan spesifikasi meningkatkan kerja sama negara-negara anggota. Sebagai organisasi independen mereka bergerak netral dan tanpa intervensi dari pihak lain. Alasannya UN Women menjalankan tugasnya dalam mengatasi perdagangan perempuan di Thailand, penegakan sedikit demi sedikit dapat teratasi dengan mengadakan kerja sama dengan mitra dan kemandirian UN Women dengan memberikan banyak pengaruh pekerjaan normatif dan kegiatan kampanye (Abbott, K.W., & Snidal, D., 1998).

### **1.7 Argumen Sementara**

Pada penelitian ini, peneliti mengidentifikasi belum terdapat penanganan yang efektif terkait masalah perdagangan perempuan pada kurun waktu 2020-2022. Diketahui bahwa tahun 2020-2022 dunia sedang dilanda pandemi *Covid-19* yang menyebabkan aktivitas masyarakat hanya dapat melalui daring dan berpengaruh pada perdagangan perempuan semakin mengikuti perkembangan media sosial. Korban yang paling terdampak adalah perempuan dan anak perempuan yang

mengalami eksploitasi pekerjaan hingga seksual. Oleh karena itu, peneliti akan menganalisis fungsi UN Women dengan menggunakan teori fungsi organisasi internasional Abbott, K.W., dan Snidal, D., (1998), yakni (1) organisasi internasional sebagai organisasi sentral, independen dan sebagai organisasi perwakilan-penegakan hukum.

Jika UN Women dihubungkan dengan teori fungsi tersebut, dapat diasumsikan bahwa UN Women di Thailand bergerak pada 2 teori fungsi organisasi internasional, yaitu sebagai organisasi sentral UN Women bertujuan mengatasi perdagangan perempuan di mana organisasi ini melakukan kegiatan *Joint Production* dan *Norm Elaboration and Coordination*. UN Women sebagai organisasi independen mereka bergerak sesuai visi mereka memperjuangkan kesetaraan perempuan untuk mengatasi perdagangan perempuan tanpa adanya intervensi dari pihak lain.

Penyebab perdagangan perempuan tidak dapat terselesaikan setiap tahunnya karena alasan agama Buddha di Thailand yang menganggap perempuan itu “tidak murni, duniawi, dan korupsi”, struktur sosial Thailand yang cenderung menerima bentuk kekerasan terhadap perempuan, adanya produk hukum yang mendukung keberadaan industri seks, mafia yang terlibat dalam partai politik, adanya organisasi pendukung industri seks yang dilakukan oleh polisi dan pejabat.

## **1.8 Metode Penelitian**

### **1.8.1 Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian dengan menggunakan metode studi literatur, penelitian ini digunakan untuk melakukan aktivitas berupa deskriptif mengenai cara untuk mencari pemecahan yang melalui

analisis hubungan sebab-akibat, faktor-faktor yang berhubungan dengan perdagangan perempuan di Thailand, dan diambil kesimpulan dari data-data yang telah dikumpulkan dari sumbernya. Dengan menggunakan studi literatur ini, peneliti akan mengetahui bagaimanakah fungsi dari UN Women dalam mengatasi *women trafficking* di Thailand dengan dikaitkan menggunakan teori organisasi internasional Abbott dan Snidal (1998).

#### 1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengidentifikasi skripsi dengan mengambil UN Women sebagai subjeknya yang ingin diketahui fungsinya dan *women trafficking* di Thailand sebagai objek penelitian dalam penelitian yang diambil.

#### 1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian penulis akan melakukan pengumpulan data dengan menggunakan sumber literatur atau kepustakaan yang berasal dari media daring berupa jurnal, laporan, berita, dan situs-situs yang merujuk kepada negara tersebut dalam mengambil kebijakan terhadap permasalahannya.

#### 1.8.4 Proses Penelitian

Penulis dalam proses penelitian, melakukan penelitian diawali dengan mengumpulkan data yang akurat dari media internet berupa jurnal, laporan, berita maupun website resmi dan buku mengenai masalah yang dihadapi negara Thailand tersebut mengenai perdagangan perempuan dan mencari sumber terkait dengan UN Women dalam mengatasi perdagangan perempuan di Thailand. Setelah itu peneliti melakukan penelitian mengenai masalah tersebut dengan menggunakan studi literatur mengenai kasus yang dialami UN Women dalam mengatasi masalah perdagangan perempuan di Thailand. Kemudian peneliti dapat menyimpulkan



bagaimanakah fungsi UN Women dalam mengatasi *women trafficking* di Thailand pada tahun 2020-2022.

### **1.9 Sistematika Pembahasan**

Pada Bab 1 berisi penjabaran mengenai pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah perdagangan perempuan di Thailand, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan masalah, tinjauan pustaka, landasan teori, argumen sementara, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Pada Bab II berisi penjabaran mengenai perdagangan perempuan sebelum dan semasa Covid-19.

BAB III berisi analisis fungsi UN Women dalam mengatasi *women trafficking* di Thailand, yakni fungsi UN Women sebagai organisasi internasional yang sentral dan independen.

BAB IV berisi kesimpulan dan saran dari hasil penjabaran permasalahan yang berkaitan dengan fungsi UN Women dalam mengatasi hal tersebut.

## **BAB II**

### **Perdagangan Perempuan Masa *Covid-19* di Thailand**

Berdasarkan latar belakang pada bab sebelumnya telah dijelaskan terkait dengan masalah perdagangan perempuan di Thailand, pada bab ini peneliti akan membahas terkait dengan kondisi dan penyebab-penyebab terjadinya perdagangan perempuan sebelum dan selama Covid-19.

#### **2.1 Perdagangan Perempuan Sebelum Masa *Covid-19* di Thailand**

Sebelum pandemi di kawasan wisata Pattaya di Thailand, dikenal dengan *Walking Street* yang dipenuhi dengan turis dan warga setempat di tengah gemerlap lampu dan suara musik keras setiap malam. Pattaya merupakan kota yang tidak pernah sepi dan pendapatan para pekerja seks juga menggantungkan hidupnya di kelab malam. Masalah prostitusi tidak ada habisnya walaupun dianggap immoral oleh kebanyakan orang tetapi industri seks masih bertahan hingga sekarang. Thailand terkenal dengan imagenya yang kental dengan pariwisata seksnya yang telah ada cukup lama sejak abad ke-17 (psat 2017).

Pada 2016 pemerintah Thailand pernah menginginkan penghapusan industri seks dengan pernyataan Kobkarn Wattanavrangkul sebagai Menteri Pariwisata “Turis tidak datang ke Thailand untuk seks, mereka datang karena melihat keindahan budaya Thailand dan keinginannya agar Thailand sebagai tujuan wisata yang berkualitas”. Di samping itu pemerintah Thailand juga kabarnya sedang gencar-gencarnya memperkuat pariwisata tanpa seks dan melarang rumah-rumah bordil beroperasi di Thailand, faktanya praktik prostitusi di Thailand masih aktif (Sitinjak, Kurniawan dan Paramahita 2022).

Pemerintah Thailand juga tetap mempertahankan status industri seks ilegal di bawah Undang-Undang Pencegahan dan Penindasan Prostitusi Thailand (1996), sebab terdapat 200.000-300.000 pekerja seks di Thailand yang mencari nafkah di mana legalisasi pekerjaan ini dapat melindungi ratusan ribu perempuan dari latar belakang yang terpinggirkan dari kemiskinan akut dan kekhawatiran pendapatan selama masa sulit (Sitinjak, Kurniawan dan Paramahita 2022).

Realitanya banyak perempuan Thailand percaya bahwa keberadaan pekerja seks dapat menurunkan angka pemerkosaan. Studi pada 1996 menyatakan bahwa dorongan seksual laki-laki lebih tinggi ketimbang perempuan di Thailand. Perempuan dianggap mampu mengontrol keinginan mereka sedangkan laki-laki menganggap hal tersebut kebutuhan dasar. Struktur sosial Thailand pun dapat dikatakan cenderung menerima bentuk kekerasan tersebut dan produk hukum pun juga mendukung keberadaan industri seks serta terdapat mafia yang terlibat dalam partai politik menyebabkan perdagangan perempuan terus berlangsung. Pembuat kebijakan sebagian besar pria tutup mata terkait masalah ini, sehingga banyak orang yang terlibat dalam kepentingan mereka menutup mata terhadap masalah yang terjadi (Stekom 2018).

Dalam buku “*Disposable People: New Slavery in the Global Economy*” Kevin Bales berpendapat bahwa Agama Buddha di Thailand menganggap perempuan secara alami lebih lemah ketimbang laki-laki dan Buddha berkata kepada murid-muridnya bahwa perempuan itu tidak murni, duniawi, dan korupsi. Hal ini dipercaya bahwa perempuan tidak mungkin mendapat pencerahan, meskipun mendapat pertentangan dari Vinaya Pitaka. Dalai Lama menegaskan

bahwa perempuan dapat mencapai pencerahan tetapi cabang Budha seperti itu tidak ada di Thailand (Bales K. 2004).

Kevin Bales juga menunjukkan fakta sepuluh jenis istri yang diuraikan di Vinaya atau peraturan pendeta. Peraturan ini terdapat tiga jenis perempuan yang dapat dibayar untuk melayani. Pada saat ini, hal tersebut diwujudkan sebagai toleransi kegiatan prostitusi perempuan yang telah menikah. Seorang istri yang mengizinkan suaminya untuk berhubungan seksual tanpa makna dengan pekerja seks dibandingkan mempunyai istri baru dianggap sebagai “seks kosong”. Agama Budha juga menulis bahwa “penerimaan dan kepasrahan menghadapi penderitaan hidup”, sesuai dengan kepercayaan terhadap karma untuk menghapus dosa dari kehidupan sebelumnya. Bahkan perempuan yang memiliki kepercayaan bahwa bekerja sebagai pekerja seks merupakan karma (Bales K. 2004).

Bahkan pariwisata seks ini berfungsi besar dalam sektor pariwisata Thailand sekitar 60% pendapatan nasional Thailand sektor pariwisata. Prostitusi menjadi pekerjaan yang cepat menghasilkan uang banyak untuk keluar dari permasalahan ekonomi. Penyebab lainnya masalah ini di Thailand terjadi akibat pemerintah mengedepankan sektor industri dan jasa, tapi mengabaikan sektor pertanian (pssat 2017).

Kasus prostitusi menjadi kasus perdagangan perempuan yang sangat berdampak Berdasarkan data laporan tahunan pemerintah Thailand, perdagangan manusia sulit untuk dituntaskan karena wisata seks dari tahun ke tahun menyumbang banyak pendapatan nasional bagi pemerintah Thailand. Alasannya pemerintah yang sejak awal kurang mendukung masyarakat sebagai petani atau penduduknya bermata pencaharian pada sektor pertanian, tetapi lebih didesak oleh

pemerintah untuk mengedepankan sektor industri dan jasa. Apalagi perbedaan kondisi ekonomi di desa dan kota sangat timpang yang didorong oleh konsumerisme dan gaya hidup yang tinggi (pssat 2017).

Maka, prostitusi menjadi pekerjaan ilegal yang menghasilkan uang banyak dalam waktu singkat diterima dengan baik oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok dan tuntutan gaya hidup. Alasan lainnya juga karena di Thailand lapangan pekerjaan tidak tersedia untuk perempuan muda dari desa yang kurang berpendidikan dan berpengalaman serta kehidupan yang serba terbatas. Mereka mau tidak mau harus bertanggung jawab di dalam keluarga dan dapat dipastikan kebanyakan dari mereka menjadikan pekerjaan prostitusi sebagai ladang mencari uang secara cepat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (pssat 2017).

Diketahui bahwa jumlah korban perdagangan manusia yang berhasil diselamatkan pada tahun 2019 berkisar 1807 orang, melonjak ketimbang tahun 2018 yang berkisar 622 orang. Sekitar 60 persen para korban yang diselamatkan berasal dari perempuan yang diperdagangkan dan tiga perempat dari mereka migran Myanmar yang menuju Malaysia. Thailand dikenal sebagai rumah bagi para migran, sekitar 4,9 juta migran yang merupakan 10 persen dari total angkatan tenaga kerja dan sebagian besar pendatang dari negara tetangga yang lebih miskin seperti Myanmar, Kamboja, dan Vietnam. Menurut data *Global Slavery Index* yang dikeluarkan oleh kelompok hak asasi *Walk Free Foundation*, Thailand merupakan rumah bagi 610.000 orang korban perbudakan modern, sekitar satu dari 113 dari jumlah 69 juta populasi negara ini (Sitorus 2020).

Menurut penilaian para pengacara dan aktivis, lonjakan besar jumlah korban yang ditemukan pihak berwenang akan menimbulkan tekanan pada sembilan

tempat penampungan para korban yang selamat. Para aktivis pun bertanya-tanya terkait dengan korban yang diselamatkan pihak berwenang yang melibatkan eksploitasi orang untuk keuntungan finansial atau diselundupkan ke negara lain secara ilegal (Sitorus 2020).

Perdagangan perempuan juga terkait dengan eksploitasi yang dilakukan oleh polisi dan pejabat pemerintah karena posisi pekerja seks yang lemah rentan dieksploitasi. Pada posisi tersebut, dijadikan bisnis dengan keuntungan besar sehingga digunakan untuk membujuk pihak berwenang menutup mata dan untuk mendapatkan izin menjalankan bisnis ini. June salah satu pekerja bar mengatakan bahwa setiap minggu pemilik bar memberikan jumlah uang ke berbagai departemen pemerintah yang datang untuk mengumpulkan uang suap. Setiap departemen menuntut bar membayar 1.000-2.000 baht (Victor 2018).

Undang-undang yang melarang pekerja seks di Thailand berpengaruh bagi mereka penyedia tempat prostitusi karena sogokan uang dengan jumlah besar dibayarkan kepada pihak berwenang. Para pejabat secara keseluruhan telah meraup keuntungan dari uang suap yang dibayarkan sebanyak 800.000 baht sebulan. Pla salah satu mantan pekerja seks yang bergabung menjadi sukarelawan organisasi hak-hak perempuan *Empower Foundation*, mengatakan bahwa mobil polisi berpatroli sekitar rumah bordil setiap malam, mereka mencari pekerja asing yang mengunjungi rumah bordil tidak memiliki dokumen dan menangkap buruh yang tidak memiliki izin kerja serta dipaksa membayar uang suap agar dibebaskan (Victor 2018).

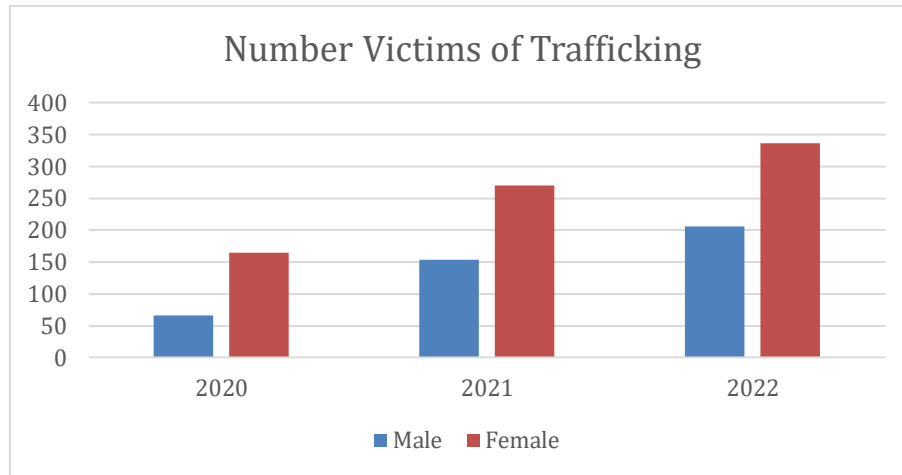
## **2.2 Perdagangan Perempuan masa *Covid-19* di Thailand**

Dua tahun yang lalu, seluruh dunia dihebohkan dengan merebaknya virus Covid-19 di Wuhan, China. Pertama kali virus Covid-19 masuk ke Thailand pada tanggal 13 Januari 2020. Awalnya disebabkan oleh seorang perempuan yang datang ke Thailand dari China terinfeksi virus Covid-19. Kemungkinan dia tertular melalui hubungan kekerabatan (keluarga pasien) yang menyebabkan penyebaran virus tersebut (Schnirring, 2020).

Thailand merupakan negara yang pertama mendeteksi penyebaran Covid-19 di luar China, sehingga pemerintah dengan tegas mengambil langkah pencegahan yang ketat terutama pada pembatasan keluar rumah, seperti berdiam diri di dalam rumah untuk mencegah penyebaran virus Covid-19. Akibatnya, selama pandemi mata pencaharian masyarakat terbatas pada internet, kunjungan wisatawan dibatasi bahkan ditutup sementara, lapangan pekerjaan terbatas, dan penurunan jumlah tenaga kerja yang berdampak pada meningkatnya angka pengangguran.

Berdasarkan Survei Pekerjaan Informal oleh Kantor Statistik Nasional tahun 2019, 9 juta atau 44 persen dari 20 juta pekerja informal di Thailand adalah perempuan. Sebagian besar dari mereka menghadapi masalah pendapatan yang lebih rendah selama pandemi, ada yang tidak berpenghasilan atau menganggur, dan perlindungan sosial juga terbatas (Ketunuti & Chitangwong 2020).

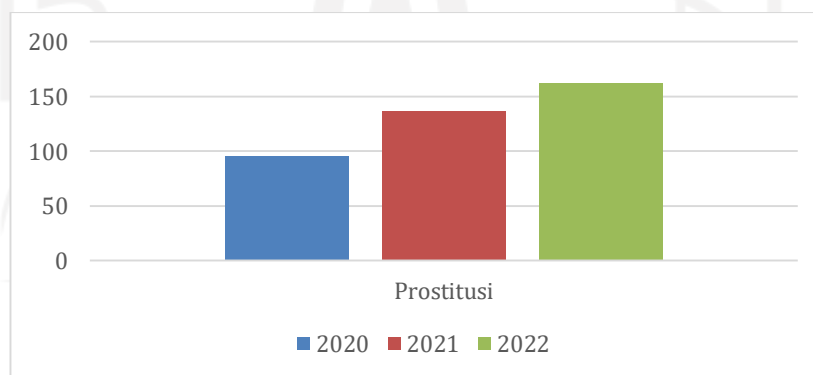
### **Gambar 2.2. Jumlah Korban Perdagangan di Thailand 2020-2022**



Sumber: Report Royal Thai Gov 2022

Pada Gambar 2.2 menunjukkan bahwa jumlah korban perdagangan perempuan di Thailand mengalami peningkatan yang awalnya 165 menjadi 337 korban pada tahun 2020-2022. Hal ini dikarenakan keterbatasan pendapatan ataupun keadaan yang membuat mereka sulit untuk bekerja seperti sebelum adanya Covid-19. Mereka justru mencari jalan pintas dengan berbagai cara untuk dapat bertahan hidup dari pandemi ini dengan bekerja secara daring. Eksploitasi seksual merupakan kasus perdagangan manusia yang dominan berupa prostitusi.

**Gambar 2.2.1 Kasus Perdagangan Perempuan Bentuk Prostitusi 2020-2022**



Sumber: Report Royal Thai Gov 2022

Pada Gambar 2.2.1 berdasarkan data kasus prostitusi salah satu penyumbang terbesar yang mempengaruhi peningkatan kasus perdagangan perempuan selama 2020-2022 di Thailand akibat penggunaan internet selama



pandemi Covid-19, dari 96 kasus meningkat menjadi 162 kasus pada tahun 2022. Pada tahun 2022 korban perdagangan mencapai 439 korban diantaranya 199 laki-laki dan 340 perempuan (Royal Thai Government, 2022).

Covid-19 juga menimpa para pekerja migran perempuan yang terkendala bahasa, banyak dari mereka tidak mengetahui hak-haknya, dan tidak mengungkapkan informasi pribadi atau lokasi keberadaan mereka, terutama perempuan migran yang tidak berdokumen atau ilegal. Akibatnya, ketika mereka hendak menghubungi pihak berwenang, mereka khawatir ditangkap dan takut pada risiko kekerasan dan pelecehan yang tinggi dari pelaku perdagangan perempuan (*What Happened after COVID-19 Hit*, 2020).

Perlu dicatat bahwa Thailand sebagai negara yang paling banyak dikunjungi wisatawan, dinilai sangat religius, dan memiliki budaya yang unik. Mereka juga permisif atau serba membebaskan masyarakatnya mengenai identitas gender dan seksualitas. Hal ini sesuai dengan namanya yakni Thailand yang berasal dari dua kata “Thai” berarti kebebasan dan “Land” berarti tanah atau wilayah. Masyarakat akan menentukan kehidupan dengan bebas sesuai dengan prinsip dan perilaku masing-masing. Bahkan saking diberikan kebebasan, di Thailand terdapat 18 jenis kelamin di samping mengakui hukum 3 jenis kelamin. Mayoritas bahasa yang digunakan adalah bahasa Thailand sekitar 90 persen warga Thailand. Akibatnya, para pekerja migran perempuan tidak dapat memahami bahasa Thailand (Angriyana 2019).

Sejak melanda *Covid-19* Thailand, para pekerja seks khawatir tidak dapat bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari karena belum mengetahui kapan dapat segera normal kembali. Dao merupakan salah satu pekerja seks dari 50.000

pekerja seks yang mengais rezeki di mana mayoritas perempuan yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Diketahui bahwa ia merupakan seorang ibu dari lima anak yang pendapatannya lebih sedikit per minggu saat pandemi *Covid-19* ketimbang sebelumnya. Tentunya hal ini tidak cukup memenuhi kebutuhan hidupnya dan sekolah anaknya, meskipun LSM yang membantu para pekerja seks, ia kadang tetap melayani kebutuhan seks warga lokal.

Adanya *Covid-19* membuat Dao beralih menjadi penjual makanan di pinggir jalan walau penghasilannya tidak banyak seperti menjadi pekerja seks. Mengutip perkataan dari Presiden SWING seorang profesor ilmu politik di Thammasat University, Chalidaporn Songsmaphan, bahwa sebelum pandemi industri seks di Thailand menyumbangkan 8 miliar dolar AS bagi perekonomian negeri, dan hal tersebut bergantung kepada industri wisata yang mana turisme menjadi pendapatan utama bagi seluruh perekonomian wisata dan pekerja seks, meski para pekerja ini harus bekerja secara gelap sebab prostitusi terbukti ilegal. Jika mereka ada yang tertangkap, mereka harus membayar denda antara Rp. 400.000 hingga Rp. 16 Juta atau hukuman penjara maksimal 2 tahun.

Adanya *Covid-19* membuat para pekerja seks di Thailand mendesak pemerintahnya untuk mengakui keberadaannya yang dapat menjadi bagian dari pemulihan ekonomi. Mereka melakukan unjuk rasa agar dapat menerima realitasnya, pandemi hanya membuat mereka sulit. Om pekerja seks berusia 36 tahun, merupakan salah satu yang ketika *Covid-19* menggunakan internet untuk mendapatkan klien karena agar tidak terkena virus, sehingga ia biasanya membuat janji lewat internet, dengan perjanjian bila ia menunjukkan bagian tubuhnya maka kliennya harus membayar sejumlah uang yang telah disepakati. Hal yang

meresahkan juga dari pemerintah tidak memberikan bantuan keuangan, sehingga inilah yang membuat mereka menggantungkan diri bantuan baik dari mantan pelanggan atau bantuan makanan dari badan amal seperti SWING (Kompas Cyber 2021).

Pandemi ini telah memberikan beban fisik, mental, dan ekonomi bagi sebagian besar rumah tangga karena kehilangan pekerjaan, penurunan jam kerja dan pendapatan, serta krisisnya kesehatan masyarakat. Kebanyakan perempuan lebih bertanggung jawab atas banyak pekerjaan perawatan yang tidak dibayar dan mendapat tekanan sebagai pengasuh utama dan ibu rumah tangga. Pelayanan publik sulit diakses ketika *Covid-19*. Dana Jaminan Sosial tidak semua pekerja diberikan, seperti halnya pekerja seks sebab mereka tidak memenuhi syarat mendaftar di Sistem Jaminan Sosial karena pekerjaan mereka dianggap ilegal sehingga mereka tidak mendapat perlindungan jika kehilangan pendapatan dan sakit (Wannaboworn 2022).

### **BAB III**

#### **Fungsi UN Women Dalam Mengatasi Perdagangan Perempuan Di Thailand**

UN Women sebagai organisasi internasional yang memiliki maksud tujuan didirikannya untuk memberikan sumbangsih dalam mencapai kesetaraan gender agar selayaknya dapat setara dengan laki-laki, seperti dapat bekerja untuk pemerintah, ikut andil dalam bekerja membuat kebijakan, mendapatkan akses pelayanan publik, dan berkontribusi dalam mewujudkan aksi perdamaian dunia. Fungsi ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran akan kesetaraan perempuan dengan mengakui dan menghargai status gender perempuan.

Pada bab ini, peneliti akan menganalisis terkait dengan fungsi UN Women dalam mengatasi perdagangan perempuan di Thailand yang dihubungkan teori fungsi organisasi internasional yang dikemukakan oleh Abbott dan Snidal. Peneliti juga mengetahui bahwa UN Women pada fungsinya UN Women sebagai organisasi internasional yang sentral dan independen.

Alhasil, peneliti melihat kebanyakan aktivitas berkaitan dengan penjelasan bab sebelumnya yang melakukan berbagai kegiatan untuk mengatasi perdagangan perempuan berupa kerja sama yang dilakukan UN Women dengan organisasi internasional lainnya, pemerintah Thailand, dan tokoh masyarakat, serta memberikan langkah alternatif dalam mendukung perempuan Thailand untuk melatih keterampilan dan pengalaman agar dapat bekerja di pekerjaan formal.

### **3.1 Fungsi UN Women sebagai organisasi internasional yang sentral**

Organisasi internasional dengan membawa fungsi ini, dapat memperlihatkan aktivitas pendukungnya terhadap negara yang dipengaruhi kapabilitas, pemahaman, dan kepentingannya. Organisasi internasional secara sentral melakukan kegiatan kolektif melalui struktur organisasi yang konkret dan stabil serta aparatur administrasi yang mendukung. Pada bagian dukungan interaksi negara, organisasi yang mapan menyediakan forum negosiasi yang stabil, meningkatkan iterasi dan efek reputasi serta memungkinkan bertindak cepat terhadap perkembangan yang signifikan. Sentralisasi mempunyai konteks politik dalam interaksi negara (Abbott, K.W., dan Snidal, D. 1998)..

Organisasi internasional menyediakan forum netral, depolitisasi atau pengkhususan efektif yang memungkinkan perilaku yang lebih luas bahkan di mana negara adikuasa dapat mendiskusikan masalah serius tanpa intervensi politik besar. Organisasi internasional juga berfungsi sebagai forum partai koalisi politik dapat memperkuat keterkaitan masalah dengan menempatkannya dalam struktur organisasi. (Abbott, K.W., dan Snidal, D. 1998).

Organisasi internasional lebih dari sekadar mendukung negosiasi antarpemerintah, mereka mengelola berbagai kegiatan operasional. Kegiatan organisasi internasional secara signifikan berpengaruh terhadap kemampuan, pemahaman, dan kepentingan negara yang mempromosikan norma dan praktik tertentu di antara negara-negara dengan cara yang tidak terduga (Abbott, K.W., dan Snidal, D. 1998).

Adapun cara yang digunakan UN Women *Joint Production* lebih mengarah kepada hubungan yang berkaitan dengan IOs yang dapat menguntungkan, terlibat dalam sebuah kerja tim yang diatur secara hirarkis pengawasan oleh negara-negara anggota. *Norm Elaboration and Coordination*, IOs yang mempunyai prosedur dalam menetapkan aturan, standar, dan spesifikasi meningkatkan kerja sama negara-negara anggota untuk mempertahankan kekuatan guna mempengaruhi norma-norma internasional dan perilaku negara serta memberi perlindungan bagi negara-negara yang lemah.

Sebagai organisasi internasional, UN Women telah sesuai dengan fungsi sentralnya yang mana organisasi yang bergerak untuk kemaslahatan perempuan di suatu negara. Perihal yang ditunjukkan oleh UN Women, begitu mendukung sebuah negara demi mengatasi kekerasan dan perdagangan perempuan. Sehingga, terlihat langkah strategis dari UN Women yang dilakukan perlahan-lahan terwujud untuk mengatasi kekerasan dan perdagangan manusia yang dialami oleh perempuan.

UN Women juga sebagai organisasi internasional yang sentral termasuk organisasi yang sering berkaitan dengan bentuk kegiatan berupa *Joint Production* dan elaborasi dan koordinasi norma. Pada kegiatan *Joint Production* UN Women sering melakukan kerja sama dengan organisasi internasional lainnya dalam mengatasi perdagangan perempuan di Thailand untuk melakukan pengawasan dan menindaklanjuti langkah mewujudkan kesetaraan gender yang bertujuan mengatasi perdagangan perempuan.

Sejak Juli 2019 kelompok tema telah diubah menjadi Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (GESI), diketuai oleh UN Women dan UNDP, dengan revisi TOR

untuk memasukkan dukungan terhadap implementasi kerangka kerja akuntabilitas UNCT dan rekomendasi termasuk fasilitasi Sistem- Rencana Aksi luas (SWAP) tentang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, serta melalui indikator kinerja UNCT untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (“kartu skor”); mengidentifikasi dan memberikan pelatihan bersama kepada tim antar-lembaga tentang isu-isu gender dan pembangunan dan hak-hak perempuan, termasuk namun tidak terbatas pada pengarusutamaan gender.

UN Women pernah melakukan pertemuan dengan ILO, dan FLEP bekerja sama dengan IOM pada 3 April 2022 mengenai pertemuan meja bundar yang membahas tentang tinjauan kebijakan jaminan sosial untuk pekerja rumah tangga di Thailand. Ketika terjadinya pandemi Covid-19 pekerjaan rumah tangga menjadi pekerjaan mayoritas bagi migran sekaligus memberikan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat dan ekonomi Thailand. Disamping mereka diberikan layanan, pekerja rumah tangga tidak termasuk dalam ekonomi formal dan tidak memiliki akses perlindungan jaminan sosial. Jaminan sosial ini penting bagi mereka, karena dapat mengurangi ketidakpastian hidup (thailand.iom.int 2022).

Pertemuan meja bundar ini mendatangkan 17 pekerja (10 pekerja Thailand dan 7 pekerja migran) untuk melihat persepsi, pengalaman, dan aspirasi mereka yang berkaitan dengan jaminan sosial dan untuk mencari rekomendasi yang inklusif. Jaminan sosial yang tidak memadai menjadi penghalang untuk penghidupan layak termasuk hak atas tunjangan pensiun dan perlindungan pekerja rumah tangga melahirkan, seperti cuti hamil dan perlindungan kerja. Bahkan pada masa Covid-19 upah yang tidak dibayarkan, beban kerja bertambah, penganiayaan oleh majikan,

dan pengurungan paksa di tempat kerja, serta mereka mendapatkan perlakuan diskriminatif oleh penyedia layanan (thailand.iom.int 2022).

Tentunya dengan adanya pertemuan tersebut membawa dampak yang positif bagi pekerja seks yang terjaring prostitusi, yang di mana mereka nantinya mendapatkan akses jaminan sosial. Sehingga, perlahan-lahan mereka akan meninggalkan pekerjaan ilegal ini dengan didorong oleh UN Women yang bekerja sama dengan mitra dan perusahaan yang akan menampung mereka menjadi pekerja yang terbebas dari pekerjaan ilegal tersebut.

Semasa Covid-19 pada 2020 terdapat 3000 orang Thailand yang memahami dampak Covid-19 terhadap perempuan. Dengan adanya dukungan kerja sama UN Women National Committee Australia dan Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA), UN Women di Thailand berhasil menjangkau sekitar 10.000 perempuan rentan di seluruh negeri agar mendapatkan perlengkapan kebersihan yang diperlukan dan diberikan pemahaman untuk meningkatkan kesadaran berbasis gender, kekerasan terhadap perempuan, kohesi sosial, dan Covid-19.

Diketahui terdapat 110 perusahaan di Thailand yang menandatangani sefungsikat prinsip baru PBB mengenai pemberdayaan ekonomi perempuan di mana mereka menjanjikan akan meningkatkan kesetaraan gender di ruang rapat, upah setara dengan pekerjaannya, tempat kerja yang aman dan inklusif. Prinsip yang dibangun dari Prinsip Pemberdayaan Wanita oleh kerjasama UN Women dengan UN Global Compact menawarkan panduan untuk bisnis yang memberdayakan perempuan. Hal ini salah satu pergerakan yang dilakukan oleh UN



Women dalam menjalankan strateginya menjamin pekerjaan yang layak, pendapatan, dan otonomi ekonomi.

Inisiatif dari WeEmpowerAsia UN Women memiliki tujuan dalam memobilisasi sektor swasta akan kesetaraan gender, meningkatkan partisipasi penuh pada sektor ekonomi, kesetaraan perempuan melalui penerapan WEP. Sekitar 3.600 perusahaan berkomitmen pada WEP dan sekitar 100 lebih perusahaan di Thailand yang menerapkan kesetaraan gender. UN Women menciptakan peluang untuk pemulihan penuh menuju kesetaraan penuh sebagai aksi kemanusiaan melalui pemulihan kolektif dan kolaboratif demi mewujudkan masyarakat paham mengenai kesetaraan gender secara sepenuhnya (suarapatani 2020).

Pada kegiatan elaborasi dan koordinasi norma UN Women juga sering melakukan kerja sama dalam bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh pemerintah Thailand dan organisasi internasional lainnya untuk mengatasi hal tersebut. UN Women menjalankan upaya dalam membantu perempuan mendapatkan haknya dengan menjalin kerjasama dengan pihak lain seperti pemerintahan, rekan kerja UN Women dan masyarakat sipil.

Hal tersebut disebarluaskan dan disiarkan melalui radio dan tokoh perempuan. Kemudian UN Women juga merancang skema pemberdayaan ekonomi dan peningkatan mata pencaharian bagi perempuan yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung Covid-19. Hal ini juga berfungsi sebagai alternatif bagi perempuan agar tidak terjerumus ke pekerjaan ilegal seperti prostitusi. UN Women juga melakukan peningkatan kapasitas perempuan lokal melalui transfer

pengetahuan dan keterampilan melalui platform online yang inovatif (Ketunuti & Chitangwong 2020)

Dari berbagai jenis kerja sama yang dilakukan oleh UN Women, upaya organisasi internasional ini terbilang cukup berpengaruh untuk mengurangi pengaruh dari perdagangan perempuan yang berbentuk eksploitasi seksual di Thailand. Kerja sama yang dilakukan tentunya memberikan pandangan alternatif masyarakat yang kurang pengalaman dan keterampilan dibantu dalam prosesnya oleh UN Women bersama mitra perusahaan di bawah pengawasan yang memberikan peluang kerja bagi perempuan Thailand bertujuan untuk mengurangi perdagangan perempuan yang berbentuk eksploitasi seksual. Masyarakat juga dapat tergerakkan untuk bekerja dengan mengutamakan kesetaraan gender dalam pengawasan UN Women bersama perusahaan mitra UN Women (Ketunuti & Chitangwong 2020).

Namun, UN Women perlu mengetahui bahwa perdagangan perempuan di Thailand telah ada sejak zaman kerajaan hingga sekarang, bahkan pernah terjadi upaya untuk melegalkan pekerja seks sebagai pekerjaan formal. Dalam perkembangannya pekerja seks di Thailand memiliki organisasi yang mendukung mereka dalam aktivitas dan kesehatannya.

Selain itu, juga dari dalam pemerintahnya terdapat oknum pejabat yang menggunakan perdagangan perempuan ini sebagai bisnis yang menguntungkan bagi mereka dan pendapatan nasional Thailand, sehingga terjadilah praktik suap menyuap agar tempat pekerja seks bekerja tidak ditutup harus membayar sesuai yang ditentukan oleh setiap departemen. Faktanya upaya yang dilakukan dengan

berbagai kerja sama oleh UN Women sangat berpengaruh untuk mengurangi perdagangan perempuan walaupun masih terdapat organisasi yang melindungi pekerja seks dan oknum yang bermain di belakang layar (stekom 2018).

Apalagi pada masa pandemi, sekitar 300.000 pekerja seks komersial di Thailand nasibnya sangat mengenaskan karena tidak bisa menghasilkan uang di mana seluruh bar, kafe, dan tempat hiburan ditutup sehingga organisasi perlindungan bagi pekerja seks di Thailand, yakni *Empower Foundation* mengirimkan surat kepada pemerintah untuk memohon diberikan bantuan. Diketahui bahwa perempuan dan anak perempuan sebagai tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah melalui pekerjaan ini yang tidak mendapatkan uang karena Covid-19 di mana pemerintah telah menutup tempat-tempat hiburan lebih dari 100.000 pekerja seks tidak memiliki pekerjaan dan mereka tidak diberikan kompensasi dari layanan sosial.

Sehingga, pada keadaan darurat mereka bekerja untuk merawat orang lain dan alternatif mereka untuk memenuhi kebutuhan demi penghidupan dengan kekhawatiran terkait dengan pandemi dapat terjadi cukup lama dan mereka memiliki tanggungan keluarga, kebutuhan hidup, dan anak. Alhasil, mereka mencari cara yang mudah untuk mendapatkan uang melalui internet sebagai media bekerja tanpa harus bertemu dengan pelanggannya, biasanya juga mereka melayani pelanggan setianya dengan bayaran yang telah disepakati (Nugraheni 2020).

### **3.2 Fungsi UN Women sebagai organisasi internasional yang independen**

Organisasi internasional dipahami sebagai otoritas yang bertindak independen sampai batas dan sering kali netral dalam bidang tertentu. Fungsi ini

menyetarakan antara distribusi kolektif jangka pendek dan panjang negara kuat agar tidak dipengaruhi mereka dengan kemandirian organisasi yang dibahas bersama untuk mengurangi keefektifan dan kemampuan organisasi. IOs dapat mengubah sebuah keputusan yang mempengaruhi kegiatan negosiasi.

Dalam organisasi internasional aktivitas dapat berupa *laundering* dan netralitas. *Laundering* seringkali berkaitan dengan hal yang mengandung konotasi negatif menjalankan kegiatan yang untuk mendapatkan keuntungan ilegal melalui lembaga keuangan yang independen dan sebuah otonomi memerlukan pencucian konotasi ini secara sukses memberikan pengaruh IOs kepada substansi kegiatan mereka. Disisi lain Netralitas juga menjadi alasan ketidakberpihakan pada independensi yang memungkinkan IOs menjadi penengah interaksi yang disengketakan meliputi perselisihan dan keputusan alokasi di antara negara bagian. IOs dikatakan sebagai organisasi independen sebab ada netralitas yang dipahami dapat penampung informasi netral, menjadi wali, sebagai pengalokasi, dan sebagai pemantau (Abbott, K.W., dan Snidal, D. 1998).

Dengan independen organisasi internasional dapat membentuk pemahaman, mempengaruhi ketentuan interaksi negara, menguraikan norma, dan menyelesaikan perselisihan negara anggota. Organisasi internasional yang independen mempromosikan kerja sama antar pemerintah dengan lebih proaktif, lebih menginisiasi, dan mendukung organisasi. independensi sama pentingnya dalam implementasi (Abbott, K.W., dan Snidal, D. 1998)..

Namun, bagi operasi IOs substantif keberadaan pihak ketiga yang benar-benar independen, memungkinkan negara untuk mencapai tujuan mereka. Aktivitas

yang mungkin tidak dapat diterima negara dapat berubah menjadi diterima ketika dijalankan melalui organisasi internasional yang independen. Badan pemerintahan sering kali diberikan mandat bersama negara-negara anggota untuk menyelesaikan masalah suatu negara. Organisasi UN Women yang terbentuk di bawah naungan PBB berdasarkan keputusan Majelis Umum PBB yang segala tindakannya mengarah kepada upaya untuk mengurangi kejahatan perdagangan perempuan di seluruh negara. UN Women secara penuh bertanggung jawab dalam mengatasi perdagangan perempuan.

UN Women merupakan entitas bagi PBB yang memiliki dedikasi mengenai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan didirikan untuk mempercepat kemajuan dalam memenuhi kebutuhan perempuan di seluruh dunia. UN Women telah menetapkan standar global yang dijadikan tujuan utama dalam mencapai kesetaraan gender dan bekerja dengan pemerintah untuk ikut andil merancang undang, kebijakan, program, dan layanan yang diperlukan demi memastikan standar tersebut telah efektif bagi perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia.

Maka dari itu, UN Women membuat visi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang membawa perempuan ke dalam segala aspek kehidupan pada empat strategis utama, yakni:

1. Perempuan memimpin, berpartisipasi, dan mendapat manfaat yang sama dari sistem pemerintah
2. Perempuan memiliki jaminan pendapatan, pekerjaan yang layak, dan otonomi ekonomi

3. Semua perempuan dan anak perempuan terbebas dari segala bentuk kekerasan
4. Perempuan dan anak perempuan memiliki kontribusi dalam membangun perdamaian dan ketahanan yang berkelanjutan dan mendapat manfaat dari aksi kemanusiaan.

UN Women sebagai organisasi yang independen turut membantu negara yang memiliki permasalahan terhadap perempuan di seluruh dunia. UN Women bekerja independen tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun, berfungsi demi kemaslahatan bagi negara anggota untuk mengatasi kejahatan dan perdagangan manusia khususnya perempuan (*About UN Women, t.t.*).

UN Women mendukung penuh pergerakan bagi perempuan di Thailand sejak 2015 yang berkaitan dengan pekerjaan normatif yang berhubungan dengan pekerjaan utama seperti kepemimpinan dan partisipasi politik perempuan, akses keadilan. UN Women Thailand mendukung implementasi kerja normatif, diantaranya:

1. Advokasi untuk lokalisasi SDGs dan implementasi CEDAW dan Beijing Plan for Action melalui kerja UN Women bersama mesin perempuan nasional yang memperkuat sistem titik fokus gender, dan penganggaran responsif gender dan statistik gender.
2. Saran kebijakan dan percakapan dengan mitra nasional dan subnasional dalam mempromosikan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat nasional dan daerah melalui penganggaran responsif gender.

3. Dukungan teknis untuk Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia, Mesin Perempuan dan organisasi masyarakat sipil yang bekerja demi mempromosikan kepemimpinan perempuan dan partisipasi politik tingkat nasional-lokal.
4. Mendukung Pembangunan Kapasitas Pusat Koordinasi untuk Perempuan dan Anak-anak di Ujung Selatan.
5. Memperkuat kapasitas jaringan perdamaian perempuan dalam rangka mengadvokasi kohesi sosial tingkat nasional dan subnasional.

UN Women Thailand bergabung dalam kampanye “Orange the World” untuk tidak meninggalkan siapapun selama 16 hari aktivisme untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan yang merupakan inisiatif dari UE dalam mengimplementasikan “*Safe and Fair: Realizing women migrant workers’ right and opportunities in the ASEAN region*” (2018-2022) yang memberikan bantuan dan dukungan teknis membuat migrasi tenaga kerja perempuan aman dan adil di Thailand dan kawasan ASEAN untuk memastikan pekerja migran perempuan tidak terlalu rentan terhadap kekerasan dan perdagangan manusia serta mendapat manfaat dari layanan berkualitas, peningkatan pengetahuan dan sikap tentang hak, pengalaman, dan kontribusi pekerja migran perempuan.

Dengan kata lain, *Safe and Fair* memberikan dukungan teknis dan membangun kapasitas pemangku kepentingan tertuju dan penyedia layanan pemerintah, non-pemerintah, dan masyarakat sipil dalam meningkatkan kualitas layanan responsif dan memberikan perlindungan bagi pekerja migran perempuan dari perdagangan perempuan serta mengembangkan dan meluncurkan produk dan kampanye dalam

mempromosikan mengenai pengetahuan, sikap tentang hak, pengalaman, dan kontribusi pekerja migran perempuan (*Thailand, t.t.*).

UN Women di Thailand telah bekerja untuk perempuan, perdamaian, dan keamanan sejak 2012. Pada tahun 2016 melakukan kerja sama dengan Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia (MSDHS) dan organisasi perempuan setempat dalam menerapkan dan melokalkan Tindakan dan Pedoman tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan untuk memastikan akuntabilitas dan koherensi kebijakan di tingkat nasional dan sub-nasional (*Women, Peace and Security, t.t.*).

Tiga konsultasi nasional juga telah diadakan dengan tujuan memperkenalkan Tindakan dan Pedoman ini kepada perempuan lokal dan kelompok masyarakat sipil, untuk memenuhi kebutuhan perempuan dan anak perempuan di wilayah selatan.berbatasan dengan otoritas lokal dan instansi pemerintah terkait. Konsultasi Nasional Kepemimpinan Perempuan dan Perdamaian dan Keamanan pada Desember 2018 yang diselenggarakan oleh UN Women mengarah pada pelebagaan Pusat Koordinasi untuk Anak dan Perempuan di Provinsi Perbatasan Selatan (CCCW-SBP) pada Juli 2019 (*Women, Peace and Security, t.t.*).

UN Women juga dengan *Center for Girls* memberdayakan perempuan pada komunitas terkecil mengenai kapasitas yang meningkat mencegah kekerasan terhadap perempuan dan mempromosikan layanan cepat tanggap gender dalam meningkatkan masyarakat yang bertujuan memberikan dukungan dan perlindungan teruntuk perempuan dari segala kekerasan dan meningkatkan kemandirian dan kesetaraan antar perempuan. UN Women setidaknya pada masa Covid-19 telah



menjangkau sekitar 3.000 perempuan rentan yang tersebar di 9 desa yang jarang dijangkau melalui kelompok masyarakat setempat untuk memberikan keperluan yang dasar dan meningkatkan kesadaran akan kekerasan (Ketunuti & Chitangwong 2020).

Berbagai kegiatan yang mendukung pergerakan mengatasi perdagangan perempuan di Thailand, UN Women terlihat memberikan banyak sekali pandangan bahwa organisasi ini bekerja demi tercapainya kesetaraan gender. Sebaliknya, hal tersebut memberikan efek yang signifikan guna mengurangi masalah perdagangan perempuan yaitu eksploitasi seksual yang terus menerus setiap tahun menjadi masalah paling dominan kasusnya.

Ketika Covid-19 melanda Thailand pun kasusnya tetap berada tingkat pertama yang berpengaruh dalam perdagangan perempuan karena aktivitas mereka bekerja bertemu dengan pelanggan tidak perlu bertemu di tempat tetapi melalui media internet.

Pilihan mereka hanya pekerjaan ilegal ini, sebab pekerjaan ini cepat menghasilkan uang karena hal mendesak untuk penghidupan mereka agar dapat bertahan hidup ditengah pandemi yang tidak diketahui kapan waktu berakhirnya ketimbang mereka bekerja dengan perusahaan mitra UN Women dengan alur yang cukup lama. Di mana mereka harus dilatih terlebih dahulu keterampilan dan pengalaman. Tentunya membuat stigma baru mereka mengenai pekerjaan ini dan mereka cenderung kembali sebagai pekerja seks (pssat 2017).

Perihal peraturan yang telah ada dibuat oleh pemerintah Thailand dan juga ratifikasi yang peraturan terkait prostitusi yang dibantu UN Women bersama

CEDAW saja hanya sebagian yang berpengaruh tetapi tetap berlangsung hingga sekarang mengenai prostitusi.

Dikatakan “independen” UN Women dalam menjalankan tugasnya untuk mewujudkan kesetaraan dapat berpengaruh walau tidak banyak, mereka tetap bersinggungan dengan organisasi yang mendukung dan melindungi pekerja seks dari bahaya kesehatan dan ancaman orang. Organisasi tersebut salah satunya ialah SWING.

Disisi lain, seberapa independennya organisasi internasional tidak dapat mencampuri urusan organisasi lainnya, apalagi terdapat organisasi yang melindungi pekerja seks dan juga dibalik pemerintah yang menginginkan perdagangan perempuan dari teratasi, terdapat oknum pejabat dan polisi yang juga menggunakan layanan ini, serta suap menyuap membuat tempat hiburan yang menjajakan layanan seks tetap beroperasi. Keuntungan dari pekerja seks inilah yang membuat mafia dalam partai politik yang mendukung bisnis ini. Apalagi industri di Thailand menyumbang 8 miliar dolar AS bagi pendapatan nasional Thailand pada sektor pariwisata (Kompas Cyber 2021).

Pada dasarnya kedua fungsi UN Women sebagai organisasi internasional berjalan dan berhasil diterapkan di berbagai negara, namun dikaitkan dengan Thailand fungsi tersebut berjalan dan berdampak mengurangi perdagangan perempuan tetapi belum terealisasikan kinerjanya dalam mengatasi perdagangan perempuan di Thailand karena beberapa hambatan yang ada di Thailand, seperti struktur sosialnya yang memandang perempuan cenderung pasrah dengan keadaan yang terjadi disebabkan sejarah pekerja seks telah ada dari zaman kerajaan .

Dukungan-dukungan UN Women bergerak membantu Thailand dalam memerangi perdagangan perempuan. UN Women berarti berfungsi independen dalam melakukan tugasnya membantu Thailand dalam mengatasi perdagangan perempuan dengan keadaan yang netral, dengan segala cara mereka lakukan menggunakan strategi yang meminta dukungan dari organisasi internasional lain, pemerintah Thailand, dan masyarakat sipil.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Perdagangan perempuan merupakan masalah yang hingga kini masih menjadi masalah yang cukup serius di seluruh dunia, termasuk Thailand. Banyak perempuan dan anak perempuan yang diambil dari negara asal dibawa ke negara lain untuk dieksploitasi secara seksual, meskipun negara Thailand telah banyak melakukan upaya dalam memerangi perdagangan perempuan. Perdagangan manusia dapat disebabkan oleh keinginan untuk mengubah nasib, mempengaruhi kondisi politik suatu negara, karena perang, dan adanya praktik patriarki yang telah terbentuk sejak lama. Apalagi keadaan ekonomi masyarakat Thailand sangat minim membuat tingginya kemiskinan dan pengangguran serta tidak dapat mengenyam pendidikan. Alhasil, banyak yang memilih bekerja untuk kebutuhan bahkan bekerja di sektor ilegal seperti pekerja seks.

Pandemi Covid-19 pun menjadi penyebab bertambahnya kasus perdagangan manusia khususnya perempuan. Hal ini tentu membuat masyarakat Thailand kebingungan untuk bertahan hidup, mau tidak mau mereka melakukan pekerjaan yang ilegal, yakni industri seks karena cepat menghasilkan uang. Mereka melayani para turis melalui media daring dengan jumlah harga yang disepakati. Covid-19 justru membuat mereka menggunakan internet untuk hal tersebut.

Permasalahan perdagangan perempuan selalu ditangani oleh UN Women, di mana organisasi internasional ini memberikan sumbangsuhnya bersuara mendukung pemberdayaan dan hak-hak perempuan secara global untuk mencapai kesetaraan gender agar perempuan dapat bekerja yang layak dan mampu

menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengakui gender perempuan itu sama.

Dalam penelitian ini, telah dijelaskan secara detail mengenai masalah yang sedang dihadapi Thailand pada tahun 2020-2022 di mana adanya dorongan teknologi internet yang membuat kasus perdagangan perempuan bertambah. Peneliti juga mengambil kasus ini untuk dilihat kembali sejauh mana organisasi UN Women membantu dalam mengatasi perdagangan perempuan di Thailand, dengan menggunakan teori fungsi organisasi internasional yang dicetuskan oleh Abbott dan Snidal (1998) yang terdiri dari 3 fungsi, yakni Sentral, Independen, dan perwakilan-penegakan.

Dari teori tersebut, peneliti dalam mengambil kesimpulan bahwa UN Women pada fungsi Sentralnya, memiliki sumbangsih yang kuat agar mereka dapat mewujudkan kesetaraan gender perempuan di mana organisasi tersebut banyak melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengatasi perdagangan perempuan. Pada fungsi independen, UN Women sangat mendukung dalam mengatasi perdagangan perempuan yang mana dikemukakan dalam visinya untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mengenai kesetaraan gender hingga mereka memperkuat langkah-langkah mereka agar dapat mengurangi atau mengalihkan masyarakat Thailand untuk bekerja pada sektor yang seharusnya. Mereka juga berdiri sendiri tanpa intervensi lainnya, sangat membantu permasalahan pada perempuan ini. Bahkan mereka sering kali mendapatkan dukungan dari negara lainnya untuk Thailand.

UN Women memainkan fungsi penting dalam mengatasi masalah perdagangan perempuan dan anak di Thailand melalui kerjasama dengan

pemerintah dan lembaga lain, serta memfokuskan upayanya pada pendidikan dan bantuan bagi perempuan dan anak yang terkena dampak. Bahkan, dari upaya-upaya yang dilakukan oleh UN Women yang turut membantu pemerintah Thailand, seperti halnya membantu dalam pembentukan regulasi atau merevisi regulasi mengenai perdagangan perempuan berupa prostitusi dan sebagainya dengan melakukan kerja sama bersama CEDAW. Beberapa penyebab mulai dari struktur sosial perempuan cenderung pasrah, terdapat oknum polisi dan pejabat, ekonomi yang tergolong kurang dan mendesak, terdapat mafia dalam partai politik, dan suap menyuap kepada pihak berwenang.

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa fungsi UN Women dalam mengatasi women trafficking di Thailand telah dijalankan sesuai dengan aktivitas mereka yang bersifat netral dan bekerja mandiri sesuai dengan tugas yang diberikan oleh PBB dalam mewujudkan kesetaraan gender termasuk mengatasi perdagangan perempuan. Namun, karena ada kendala yang belum terpecahkan dalam negeri maka Thailand bergerak sebatas membantu dengan bekerja sama dengan organisasi internasional lainnya, pemerintah, dan tokoh masyarakat. Dengan demikian, UN Women terlihat berfungsi mengatasi hal tersebut tetapi tidak melihat lebih dalam hambatanya di Thailand.

#### **4.2 Rekomendasi**

Berdasarkan hasil penelusuran, analisis, dan kesimpulan pada penelitian ini, peneliti memahami bahwa terdapat banyak kekurangan yang perlu disempurnakan. Peneliti memberikan tiga rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, yaitu: pertama, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengikuti perkembangan perdagangan perempuan di Thailand untuk diteliti lebih lanjut agar penelitian ini

dapat disempurnakan. Hal ini khususnya yang perlu diperhatikan penyebab yang telah ada sejak lama seperti struktur sosial, keadaan dalam pemerintah Thailand, organisasi yang mendukung, langkah-langkah yang dilakukan UN Women dalam mengatasi hal ini.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abbott, K. W., & Snidal, D. 1998. Why States Act Through Formal International Organizations. *Journal of Conflict Resolution*, 9-25.
- Anissa, R. N. 2021. Upaya United Nations (UN Women) Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender Melalui Kampanye HeForShe di Indonesia Tahun 2016-2019. *JOM FISIP*, 8.
- About UN Women*. (t.t.). UN Women – Headquarters. Diambil 15 Desember 2022, dari <https://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women>
- Against the Odds: Stories from Women in Thailand during COVID19*. 2020. UN Women – Asia-Pacific. 26 Juni 2020. <https://asiapacific.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2020/06/against-the-odds-stories-from-women-in-thailand-during-covid19>.
- Angriyana, Shinta. 2019. “Thailand: Antara Seks, Gender dan Kehidupan Religius.” Detik Travel. <https://travel.detik.com/travel-news/d-4404284/thailand-antara-seks-gender-dan-kehidupan-religius>.
- Bales, Kevin. 2004. *Disposable People: New Slavery in the Global Economy*. Los Angeles: University of California Press.
- Blue Campaign. (2022, September 22). *What Is Human Trafficking?* Dipetik November 25, 2022, dari <https://www.dhs.gov/blue-campaign/what-human-trafficking>
- Center For Global Impact. (t.thn.). *4 Causes of Human Trafficking*. Dipetik November 25, 2022, dari <https://centerforglobalimpact.org/cgi-kids/4-causes-of-human-trafficking/>
- Di Thailand Banyak Eksploitasi Perempuan dan Anak, Paus Fransiskus Marah*. (2019, November 22). Warta Ekonomi. <https://wartaekonomi.co.id/read257856/di-thailand-banyak-eksploitasi-perempuan-dan-anak-paus-fransiskus-marah>
- General Assembly UN. (2009, Oktober 2). *UN Women Resolution 63/311 General Assembly*. Diambil kembali dari undocs.org: <https://undocs.org/A/res/63/311>
- History of UNIFEM timeline*. (t.t.). Timetoast Timelines. Diambil 15 Desember 2022, dari <https://www.timetoast.com/timelines/history-of-unifem>
- Head, J. (2020, Maret 18). Virus corona: Pariwisata Thailand anjlok karena Covid-19. *BBC News Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-51909637>



- Hoedy, W. (2021, Oktober 24). *Sejarah Singkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Kiprah Bangsa Indonesia di PBB*. Diambil kembali dari womanindonesia.co.id: <https://www.womanindonesia.co.id/sejarah-perserikatan-bangsa-bangsa-pbb/>
- IOM Jointly with ILO, UN Women and FLEP Organize a Roundtable. 2022. IOM Thailand. <https://thailand.iom.int/news/iom-jointly-ilo-un-women-and-flep-organize-roundtable-discussion-domestic-workers-social-security-thailand>.
- Ketunuti, V., & Chitangwong, S. (2020, Juni 26). *Against the Odds: Stories from women in Thailand during COVID-19*. Diambil kembali dari thailand.un.org: <https://thailand.un.org/en/51835-against-odds-stories-women-thailand-during-covid-19>
- Migration Data Portal. (2021, Mei 6). *Human Trafficking*. Diambil kembali dari migrationdataportal.org: <https://www.migrationdataportal.org/themes/human-trafficking>
- Nugraheni, Mutia. 2020. "Pandemi Covid-19, Nasib Ribuan PSK Thailand di Ujung Tanduk." Dream.co.id. <https://www.dream.co.id/stories/pandemi-covid-19-nasib-ribuan-psk-thailand-di-ujung-tanduk-200405q.html>.
- Nurfahirah, A., Dewi, Y. T., & Gustiana, D. D. 2022, Juni. Upaya United Nations Women (UN Women) dalam Menangani Diskriminasi terhadap Perempuan di Afghanistan. *Jurnal Transborder*, 103-104.
- Novianti. 2014. Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara. *Jurnal Ilmu Hukum*, 50-62.
- Oryza, M. D. 2016. Fungsi UN Women dalam Upaya Thailand Mengatasi Permasalahan Perdagangan Perempuan. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*.
- Pelacuran di Thailand: Dasar-Dasar Hukum*. Diakses Februari 4, 2023. [https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Pelacuran di Thailand](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Pelacuran%20di%20Thailand).
- Prayuda, R., Harto, S., & Gunawan, D. 2019. Politik Institusi Rezim Internasional (Konsep dan Pendekatan Analisis). *Journal of Diplomacy and International Studies*, 105.
- Resti, D. Y. 2017. Upaya (UNIFEM) United Nations Development Fund for Women Dalam Menangani Masalah Diskriminasi dan Kekerasan Terhadap Perempuan di Bangladesh. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 1353-1364.
- Rezaul, K., & Kamran, S. (2020, Juli 30). *Just 4% of human trafficking cases end in conviction*. Diambil kembali dari tbsnews.net:

<https://www.tbsnews.net/bangladesh/just-4-human-trafficking-cases-end-conviction-113548>

- Royal Thai Government. (2019). *Royal Thai Government's Country Report On Anti-Human Trafficking Efforts*. Thailand: [thaianti-humantraffickingaction.org](http://thaianti-humantraffickingaction.org).
- Royal Thai Government. (2021, Desember 31). *Royal Thai Government's Country Report on Anti-Human Trafficking Efforts*. Diambil kembali dari [aseanactpartnershiphub.com](http://aseanactpartnershiphub.com): <https://aseanactpartnershiphub.com/wp-content/uploads/2022/02/Thailands-Country-Report-on-Anti-Human-Trafficking-Efforts-2021.pdf>
- Romanow, Liza. 2012. "The Women of Thailand." *Global Majority E-Journal*.
- Sianturi, M. H. 2014. Fungsi PBB Sebagai Organisasi Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Yurisdiksi Negara Anggota Dalam Kasus State Immunity Antara Jerman Dengan Italia Terkait Kejahatan Fungsig Nazi. *Journal of USU International Law*.
- Suri, G. A., Hamka, & Noerzaman, A. (2020, April). Fungsian United Nations Women Dalam Mengatasi Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Indonesia 2016-2017. *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia Dan Global*, 31.
- Savitri, P. I. (2021, Desember 17). *Komnas Perempuan catat 816 kasus perdagangan manusia pada 2017-2020*. Diambil kembali dari [antaranews.com](http://antaranews.com): <https://www.antaranews.com/berita/2591957/komnas-perempuan-catat-816-kasus-perdagangan-manusia-pada-2017-2020#mobile-src>
- Septiana, T. (2021, September 28). *Organisasi dan lembaga di bawah naungan PBB selain WHO dan UNICEF*. Diambil kembali dari [lifestyle.kontan.co.id](http://lifestyle.kontan.co.id): <https://lifestyle.kontan.co.id/news/organisasi-dan-lembaga-di-bawah-naungan-pbb-selain-who-dan-unicef/?page=all>
- Setyawan, D. (2014, Juni 16). *WASPADA BAHAYA PERDAGANGAN ORANG (TRAFFICKING) DAN PENYELUNDUPAN MANUSIA (SMUGGLING)*. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/waspada-bahaya-perdagangan-orang-trafficking-dan-penyelundupan-manusia-smuggling>
- Sejarah Singkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Kiprah Bangsa Indonesia di PBB*. (2021, Oktober 24). Diambil kembali dari [womanindonesia.co.id](http://womanindonesia.co.id): <https://www.womanindonesia.co.id/sejarah-perserikatan-bangsa-bangsa-pbb/>
- Schnirring, L. (2020, Januari 14). *Report: Thailand's coronavirus patient didn't visit outbreak market*. Diambil kembali dari [web.archive.org](http://web.archive.org):

<https://web.archive.org/web/20200114230152/http://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2020/01/report-thailands-coronavirus-patient-didnt-visit-outbreak-market>

UN Women Thailand Country Programme. (2011). *Thailand*. Diambil kembali dari [asiapacific.unwomen.org](http://asiapacific.unwomen.org):

[https://asiapacific.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20ES EAsia/Docs/Publications/2011/06-THAILAND-factsheet.pdf](https://asiapacific.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20ES%20EAsia/Docs/Publications/2011/06-THAILAND-factsheet.pdf)

Victor, Patrice. 2018. "Sex in grey areas (2): how the junta threatens the lives of sex workers." Prachatai English | <https://prachataienglish.com/node/7540>.

110 Perusahaan Thailand Perkuat Pemberdayaan Ekonomi Perempuan. 2020. Suarapatani. <https://suarapatani.com/news/110-perusahaan-thailand-perkuat-pemberdayaan-ekonomi-perempuan>.

